



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS PERHUBUNGAN**

*ꦩꦶꦏꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦸꦃꦸꦁꦤ꧀ꦠꦸꦭ*

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul ☎ (0274) 367321  
Website: <http://dishub@bantulkab.go.id>, Email: [dishub@bantulkab.go.id](mailto:dishub@bantulkab.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL**  
Nomor : 02/KPTS/DISHUB/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2024, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Bantul Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :  
PERTAMA

: Menunjuk Saudara :

1. Nama : Yohanes Ariyanto, SE, MP  
NIP : 197402261993031001  
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I, IV/b  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
2. Nama : Sri Harsono, SH  
NIP : 19661001 199003 1 008  
Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a  
Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
3. Nama : Agus Sutomo, SH, M. IP.  
NIP : 197908172006041015  
Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a  
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
4. Nama : Toto Pamudji Rahardjo, A. KS  
NIP : 196806291989021001  
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a  
Jabatan : Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEDUA

: Daftar Program Kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing – masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA

: Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat sebagaimana tersebut amar pertama adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;

KEEMPAT : Segala sesuatu yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini seluruhnya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/perubahan terhadap Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Bantul  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

  
KEPALA DINAS  
DINAS PERHUBUNGAN  
Singgih Riyadi, SE, MM  
Pembina Tingkat I/ IV/b  
NIP. 19730721 199703 1 007

Lampiran Surat Keputusan Kepala  
Dinas Perhubungan Kabupaten  
Bantul  
Nomor :  
Tanggal : 2 Januari 2024

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SKPD  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Yohanes Ariyanto, SE, MP	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li><li>2. <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/</b> Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li><li>3. <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li><li>4. <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/</b> Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li><li>5. <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</li><li>6. <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/</b> Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</li><li>7. <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/</b> Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</li><li>8. <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah/</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li><li>9. <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah/</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li><li>10. <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah/</b> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li><li>11. <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah/</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li><li>12. <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah/</b> Fasilitasi Kunjungan Tamu</li><li>13. <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah/</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li><li>14. <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah/</b> Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</li></ol>	

		<p><b>15. Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</b></p> <p><b>16. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b></p> <p><b>17. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b></p> <p><b>18. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b></p> <p><b>19. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b></p> <p><b>20. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b></p> <p><b>21. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b></p> <p><b>22. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b></p>	
2.	Sri Harsono, SH	<p>1. <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota / Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</b></p> <p>2. <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota / Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b></p> <p>3. <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota / Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</b></p> <p>4. <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota / Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b></p>	
3.	Agus Sutomo, SH, M. IP.	<p>1. <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota / Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b></p> <p>2. <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan</b></p>	

		<p><b>Kabupaten/Kota /</b> Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor/</b> Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>4. <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor/</b> Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>5. <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor/</b> Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>6. <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor/</b> Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji</li> <li>7. <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor/</b> Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>8. <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor/</b> Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> </ol>	
4.	Toto Pamudji Rahardjo, A. KS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/</b> Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)</li> <li>2. <b>Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota /</b> Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</li> <li>3. <b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota /</b> Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>4. <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota /</b> Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</li> </ol>	

KEPALA DINAS



Singgih Riyadi, SE, MM  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19730721 199703 1 007